RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

RENSTRA 2021-2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ini dapat selesai pada waktunya dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk membangun prestasi aksi dan prestasi hasil melalu perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis ini merupakan acuan bagi pelaksanaan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis yang disusun menitikberatkan pada tata kelola pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir semua upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diamanatkan dalam Prioritas Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu segala masukan dan saran demi penyempurnaan Rencana Strategis ini sangat kami harapkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat,

Pembina Utama Muda (IV.c) NIP. 196510281986111001

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PE	NGAN	ITAR	i
DAFTAR	ISI		ii
DAFTAR	TABE	L	iii
BAB I	: PEN	NDAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
BAB II	: GAI	MBARAN PELAYANAN SKPD	7
	2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
	2.2.	Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan	18
	2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	19
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
BAB III	: PER	RMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	24
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fung	si24
	3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan	
		Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
	3.3.	Telaahan Renstra Kemeterian dan Renstra Provinsi	28
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	30
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV	: TU	JUAN DAN SASARAN	34
	4.1.	Tujuan	34
	4.2.	Sasaran	35
BAB V	: STF	RATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI	: REI	NCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAA	N42
BAB VII	: KIN	IERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII	· PFN	JUTUP	59

DAFTAR TABEL

Н	a	la	m	a
	а	ıa		a

Tabel 2.1.	Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Tabel 2.2.	Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.3.	Sarana Kerja Dinas	18
Tabel 2.4	Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan	
	Pencatatan Sipil	21
Tabel 2.5.	Kinerja Keuangan	22
Tabel 2.6.	Formulasi Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	35
Tabel 5.1.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	38
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	46
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, maka Organisasi Perangkat Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perlu merumuskan strategi dalam mendukung pembangunan Big Data Kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penduduk yang belum terdata/terekam dalam Data Base Kependudukan dan atau belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, migrasi penduduk, penduduk kematian. rentan administrasi kependudukan, kelahiran. perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, Inovasi dan pemanfaatan data kependudukan yang mana semuanya menjadi satu kesatuan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan satu data kependudukan dan pencatatan sipil melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku secara nasional.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumbawa Barat perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (Lima) tahun dan dirumuskan secara berkesinambungan memperhitungkan Strengths (Kekuatan), dengan Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah :

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
- 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

Tersedianya dokumen perencanaan dalam 5 (Lima) tahun kedepan yang menjadi landasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;

❖ Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara

berkelanjutan dan sistematis, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran demi terwujudnya kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaran tugasdan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Organisasi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan. rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masingmasing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
- e. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTPel, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan

- Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- I. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruantinggi;
- Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis DataKependudukan;
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

2.1.1.1. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumahtangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. Pembinaan aparatur;
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

2.1.1.1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi Kepegawaian, Kearsipan, Rumah Tangga dan Perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a Pelaksanaan urusan persuratan;
- b Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d Pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;

2.1.1.1.2. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dananggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

2.1.1.1.3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan, Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- e. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
- f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

2.1.1.2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

2.1.1.2.1. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan identitas penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Identitas Penduduk adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata

- penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- d. Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak.

2.1.1.2.2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Seksi Pindah Datang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah dating dan pendataan penduduk;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah dating dan pendataan penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pindah dating dan pendataan penduduk;
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah dating dan pendataan penduduk.

2.1.1.3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberian layanan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

2.1.1.3.1 Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

2.1.1.3.2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan pencatatan perkawinan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

2.1.1.4 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi:
- b Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi Kependudukan.

2.1.1.3.1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang Sistem Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi system informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. Penyiapan dan pelaksanan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan.

2.1.1.3.2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. penyiapan dan pelaksanan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

2.1.1.4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
- e. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2.1.1.4.1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- Penyiapan koordinasi kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanan kebijakan teknis kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

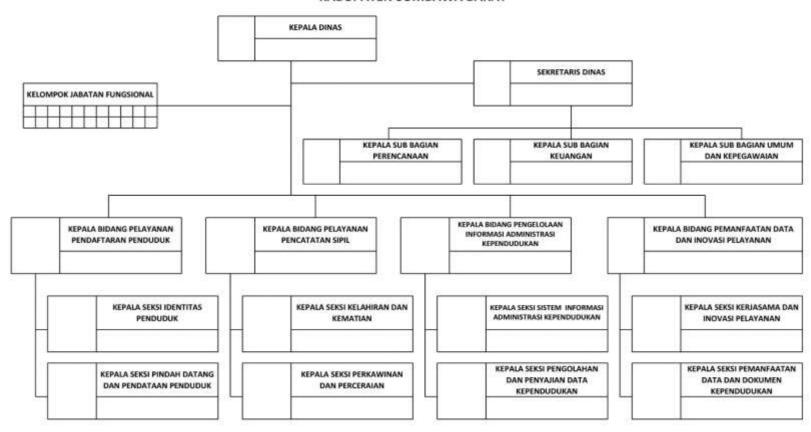
2.1.1.4.2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rincian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

2.1.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT



2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

Tabel. 2.1. Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

Jabatan	Golongan				
Japatan	IV	III	II	I	
Kepala Dinas	1	-	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	
Kepala Bidang	4	-	-	-	
Kasubag	-	3	-	-	
Kasi	-	8	-	-	
Fungsional	-	-	-	-	
Staf	-	8	8	-	
Total	6	19	8	-	

2.2.2 Susunan Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

Tabel. 2.2. Susunan Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

Jabatan	Pendidikan						
Japatan	S2	S1	DIPLOMA	SLTA	SLTP	SD	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	-	-	
Kepala Bidang	2	-	1	1	-	-	
Kasubag	1	2	-	-	-	-	
Kasi	1	6	-	1	-	-	
Fungsional	-	-	-	-	-	-	
Staf	-	7	5	3	1	-	
Honorer/PTT	-	13	4	12	-	1	
Total	6	28	10	16	1	1	

2.2.3 Sarana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.3. Sarana kerja Dinas.

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	MOBIL DINAS	2	Unit
2	MOTOR DINAS	15	Unit
3	FORTABLE GENERATING SET	1	Unit
4	RAK KAYU	5	Unit
5	FILING BESI/METAL	4	Unit
6	BRANGKAS	1	Buah
7	LEMARI KAYU	6	Unit
8	WHITE BOARD	1	Unit
9	DRY SEAL	1	Buah
10	ALAT KANTOR LAINNYA/SHIMITZU	1	Unit
11	MESIN ABSENSI	1	Unit
12	MEJA RESEPTION	1	Unit
13	KURSI BIASA	2	Unit
14	KURSI LIPAT	104	Unit
15	SOFA	6	Unit
16	MEUBELAIR LAINNYA	1	Unit
17	MESIN POTONG RUMPUT	1	Buah
18	LEMARI ES/KULKAS	2	Unit

19	AC UNIT	10	Buah
20	AC SPLIT	2	Unit
21	KIPAS ANGIN	18	Unit
22	TELEVISI	4	Unit
23	UNIT POWER SUPPLY	1	Unit
24	TUSTEL/CAMERA	1	Unit
25	CAMERA VIDEO	1	Unit
26	CAMERA PEREKAMAN	3	Unit
27	TANGGA ALUMANIUM	1	Unit
28	DISPENSER	4	Unit
29	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	1	Unit
30	MAINFRAME	1	Unit
31	PERALATAN MAINFRAME	2	Unit
32	PERSONAL KOMPUTER LAINNYA		
02	(UPS, ANTI, PRINTER E-KTP)	3	Unit
33	PC/UNIT	29	Unit
34	LAPTOP	23	Buah
35	NOTE BOOK	1	Buah
36	HARD DISK	4	Unit
37	PRINTER (PERALATAN PERSONAL	38	Unit
	KOMPUTER)		Offic
38	SCANER	7	Buah
39	EKSTERNAL	3	Unit
40	SERVER	1	Unit
41	ROUTER	2	Buah
42	HUB	1	Buah
43	PERALATAN JARINGAN LAINNYA	18	Unit
44	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	3	Unit
45	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	5	Unit
46	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	11	Unit
47	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	17	Unit
48	MEJA KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	9	Unit
49	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	2	Unit
50	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	9	Unit
51	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	19	Unit
52	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	8	Unit
53	PROYEKTOR	1	Unit
54	MICROPHONE/WIRELESS MIC	3	Unit
55	WIRELESS AMPLIFIER	1	Unit
56	ANTENA SHF/PARABOLA PORTABLE	1	Unit
57	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit
58	ALAT KEAMANAN LAIN-LAIN	2	Buah
59	GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN	1	Unit
60	PERMAINAN DAN OLAH RAGA	1	Set
61	SOUNDSYTEM RUANG RAPAT	1	Paket
62	ASET RENOVASI	1	Paket
63	MEJA RAPAT	1	Paket

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, maka sasaran prioritas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan internal perangkat daerah;
- 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- 3. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil;
- 4. Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir.
- Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

Untuk melaksanakan sasaran prioritas tersebut, maka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, ada beberapa kebijakan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berbasis *Good Governance* dan *Clean Goverment*, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem *rewards and punishment* yang mendorong akselerasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan internal perangkat daerah.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas internal perangkat daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 94,50% dengan predikat sangat berhasil.

Tabel 2.1.

Data Capaian Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Satuan		Tahun 2020		
NO	iliulkatoi Killerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Realisasi Anggaran	%	100 %	94,50 %	94,50 %	
2.	Nilai SAKIP	%	В	В	100%	

Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Cakupan Kepemilikan

Dokumen Kependudukan dengan 1 indikator kinerja sasaran

memperlihatkan capaian kinerja sebesar 64,94% dengan predikat

cukup berhasil.

Tabel 2.2.
Data Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
NO	indikator Kirierja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat pemenuhan KTP Elektronik	%	90%	64,94%	64,94%

Sasaran 3: Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Cakupan Kepemilikan
Dokumen Pencatatan Sipil dengan 1 indikator kinerja sasaran
memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 dengan predikat
berhasil.

Tabel 2.3
Data Capaian Kinerja Sasaran 3

No	No Indikator Kineria		Tahun 2020			
No Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tingkat Pemenuhan dokumen Pencatatan Sipil	%	38%	75%	75%	

Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir dengan 1 indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaiankinerja sebesar 80,12 % dengan predikat berhasil.

Tabel 2.4
Data Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
INO	ilidikator Killerja		Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pengelolaan Sistem Berbasis Data Kependudukan	%	100 %	92,74%	92,74%

Sasaran 5 : Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 1 indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaiankinerja sebesar 61,56 % dengan predikat cukup berhasil.

Tabel 2.5
Data Capaian Kinerja Sasaran 5

No Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		
INO	iliulkator Killerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kerjasama pemanfaatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	100 %	61,56%	61,56%

2.3.2 Data Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Ouput Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 23 jenis dokumen yang dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) output utama yaitu dalam bentuk Kartu, Akta dan Surat.

- > Berupa Kartu ada 3 yaitu :
 - 1. Kartu Keluarga
 - 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - 3. Kartu Identitas Anak
- Berupa Akta ada 6 yaitu :
 - 1. Akta Kelahiran
 - 2. Akta Kematian
 - 3. Akta Perkawinan
 - 4. Akta Perceraian
 - 5. Akta Pengakuan Anak
 - 6. Akta Pengesahan Anak
- Berupa Surat ada 14 yaitu :
 - 1. Surat Keterangan Pindah
 - 2. Surat Keterangan Pindah Datang
 - 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 - 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal
 - 6. Surat Keterangan Kelahiran
 - 7. Surat Keterangan Lahir Mati
 - 8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
 - 9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 - 10. Surat Keterangan Kematian
 - 11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
 - 12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

- 13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- 14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Dari sekian banyak dokumen tersebut tidak harus dimiliki semua oleh setiap penduduk karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing orang. Namun ada beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh semua penduduk, seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah pada Lampiran halaman 240 dan 241 mengatur tentang Indeks Kinerja Kunci Pelayanan Adminduk di Kabupaten/Kota, dimana IKK Outcome Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- 1. Perekaman KTP Elektronik
- 2. Persentase Anak Usia 0 17 tahun kurang 1 hari yang memilki KIA
- 3. Kepemilikan Akta Kelahiran
- 4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Tabel 2.3.2.1

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa Barat

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TAHUN ANGGARAN			KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	
1	Cakupan kepemilikan KK	96,34	97,67	95,50	96,75	96,88
2	Cakupan kepemilikan KTP El	87,81	93,66	98,83	99,17	98,27
3	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran (Umur 0 - 18 Tahun)	72,60	82,53	88,31	90,86	91,87
4	Cakupan penerbitan Akta Kematian	11,63	8,53	9,13	13,26	31,00
5	Cakupan kepemilikan KIA	0	2,71	19,14	31,08	35,39
6	Cakupan Perjanjian Kerjasama	0	0	0	0	40,00

Terlihat dalam tabel diatas, capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat rata-rata mengalami peningkatan kinerja dalam tiap tahunnya yang dimulai dari kondisi awal yaitu data yang diolah pada semester II tahun 2017 dan kondisi akhir menggunakan data yang diolah pada semester I tahun 2021.

 Cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga mengalami persentase peningkatan yang tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 97,67% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan naik lagi pada tahun 2020, hal ini karena

- perubahan jumlah penduduk yag disebabkan laporan kematian yang meningkat dan migrasi penduduk;
- 2. Cakupan kepemilikan KTP elektronik mengalami persentase peningkatan yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,17%;
- 3. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran (Umur 0 18 Tahun) mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun;
- Cakupan penerbitan Akta Kematian mengalami penurunan pada tahun 2018 yang disebabkan menurunnya jumlah laporan kematian yang memepengaruhi jumlah penduduk;
- 5. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak mengalami peningkatan yang signifikan yang pelaksanaannya dimulai pada pertengahan tahun 2018 dengan kondisi akhir pada semester II tahun 2021 sebesar 35,39% dan melampaui target nasional sebesar 30%;
- 6. Cakupan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dilaksanakan pada tahun 2020 dan baru terwujud pada awal tahun 2021 karena terkendala Pandemi Covid-19. Ada 4 (Empat) OPD yang perjanjian kerjasamanya telah tercapai sampai dengan semester I tahun 2021 dari target 10 OPD.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel 2.3.2.1

Kinerja Keuangan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	TAHUN							
ANGGARAN	2018		20	19	2020			
7111007110111	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja tidak langsung	2.460.600.232	2.021.434.117	2.669.641.542	2.115.274.679	3.095.166.173	2.826.299.762		
Belanja langsung	3.723.746.824	3.513.688.908	4.095.720.000	3.861.507.051	2.247.542.393	1.997.014.945		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

A. Faktor Internal:

Kekuatan (Strength)

Kekuatan pada aspek internal yang dimilki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya antara lain :

- Penguatan kelembagaan yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan;
- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang sudah diperkuat dengan memperhatikan kebijakan, peraturan, teknologi informasi dan komunikasi;
- Perlindungan data pribadi penduduk yang dijaga kebenarannya dan kerahasiaannya oleh Penyelenggaradan Instansi Pelaksana sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kelemahan (Weaknesses)

Faktor internal berupa kelemahan atau hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

- Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal, terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumber daya manusia (SDM);
- Pemahaman dan penegakan hukum dari berbagai kebijakan dan regulasi masih sangat lemah.Hal ini terlihat dari pemanfaatan TIK untuk penegakan "E-Government for Good Government" belum berjalan secara optimal;
- Beberapa regulasi baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang tidak memungkinkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai keleluasaan dalam mengatur dirinya sendiri, mengingat status Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri berpengaruh terhadap pembangunan data

- administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- Regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah, ini bisa dilihat dari isi peraturan yang belum memperhatikan dan mengakomodir promosi/jenjang karir dari pegawai internal Dukcapil itu sendiri, sehingga seringkali pelaksanaan, target dan keberlangsungan program dan kegiatan terhambat yang diakibatkan pengisian jabatan dari eksternal yang mana memerlukan penyesuaian sedangkan pegawai internal sudah banyak yang memenuhi syarat;
- Keberpihakan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang masih lemah terhadap Pelayanan Publik kependudukan dan pencatatan sipil, hal ini terlhat dari keterbatasan anggaran untuk pelayanan adminduk yang mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas pelayanan serta pencapaian target nasional.

B. Faktor Eksternal

❖ Peluang (Opportunities)

Peluang yang mendukung atau menjadi kekuatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- Tersedianya database kependudukan berbasis NIK secara nasional yang dapat diakses oleh seluruh stake holder/instansi pengguna untuk pelayanan publik;
- KTP-el yang berlaku secara nasional dapat digunakan sebagai pelayanan publik bagi seluruh instansi pengguna/stake holder sesuai dengan kebutuhannya;
- Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem administrasi kependudukan (SIAK) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan adanya SIAK. Tidak ada lagi keberagaman data kependudukan kecuali data dari SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);

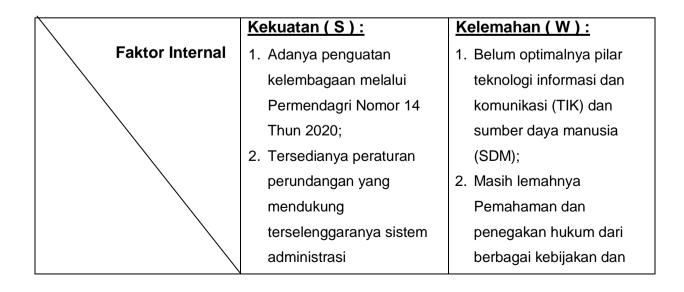
❖ Tantangan (Threats)

Tantangan atau kondisi yang dapat menjadi penghambat ataupun pendukung pelaksanaan tugas, antara lain :

- Tuntutan masyarakat akan output yang berkualitas dari database kependudukan yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih mengalami kendala;
- Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan;
- Mendorong NIK sebagai dasar penerbitan Single Identity Number (SIN) untuk semua pelayanan publik;
- Masih ditemukannya peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan kependudukan yang sifatnya tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakselarasan kebijakan pemerintah;
- Kemandirian teknologi terkait sumber daya manusia dalam pengelolaan database kependudukan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, maka dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, dapat dirumuskan Strategis/kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghadapi Tantangan dan Peluang untuk pengembangan Pelayanan SKPD, yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.4.1
Formulasi Strategi Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021 -2026



Faktor Eksternal

- kependudukan;
- Penguatan Sistem
 Informasi dministrasi
 Kependudukan (SIAK);
- Perlindungan data pribadi penduduk
- regulasi;
- Regulasi yang menghambat pengambilan kebijakan;
- Masih lemahnya database kepegawaian Ditjen Dukcapil;
- 5. Keterbatasan anggaran

Peluang (O):

- Tersedianya database kependudukan berbasis NIK secara nasional;
- KTP-el yang berlaku secara nasional;
- Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan;
- Penunggalan data pada aplikasi SIAK.

Strategi SO

- 1. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui sistem pelayanan jemput bola dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis data SIAK;
- Meningkatkan
 pemanfaatan data
 kependudukan melalui
 perjanjian kerjasama;

Strategi WO

- Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan teknologi informasi;
- Meningkatkan kompetensi pengelola SIAK;
- Meningkatkan
 penggunaan sumber
 daya teknologi informasi
 dalam pelayanan
 adminduk;
- 4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta legislatif untuk mendapatkan tambahan anggaran.

Tantangan (T):

- Tuntutan masyarakat akan output yang berkualitas dari database kependudukan yang semakin tinggi;
- Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin

Strategi: ST

- Penguatan SDM teknologi informasi;
- Penguatan sarana prasarana teknologi informasi dan pemanfaatan media dan aplikasi online dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan melalui

Strategi: WT

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan aplikasi dan media online dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Melaksanakan
 pemutakhiran data
 penduduk secara berkala
 sehingga data penduduk

	tinggi	perjnjian kerjasama;		dapat up to date dan
3.	Mendorong NIK sebagai			kualitas data SIAK
	dasar penerbitan Single			semakin baik;
	Identity Number (SIN)		4.	Meningkatkan koordinasi
	untuk semua pelayanan			dengan Ditjen Dukcapil
	publik.			tidak hanya menyangkut
4.	Masih ditemukannya			bidang teknis tapi juga
	peraturan dan			meyangkut bidang
	perundangan yang			seketariat.
	berkaitan dengan			
	kependudukan yang			
	sifatnya tumpang tindih			
5.	Kemandirian teknologi			
	terkait sumber daya			
	manusia dalam			
	pengelolaan database			
	kependudukan			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, hasil telaahan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 dan Renstra Dinas PMPD Dukcapil Provinsi Tahun 2019 2023, Serta hasil telaahan RT/RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dirumuskan permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Persebaran penduduk dan kondisi geografis

Kondisi geografis yang luas dan banyak perbukitan serta persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan keliling kepada masyarakat dan juga meyulitkan akses bagi masyarakat yang jauh untuk datang ke pusat pelayanan di ibu kota kabupaten;

2. Pemahaman substansi dan materi administrasi kependudukan

Sosialisasi berbagai kebijakan di bidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal. Pemahaman masyarakat dan aparat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan masih sering sipil umumnya teriadi adanya kerancuan, meskipun keduanya ada keterkaitan tetapi masing-masing merupakan domain yang berbeda. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan pada kegiatan administratif untuk identifikasi penduduk menurut domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan kepada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa yang dialaminya. Sebagai pembuktian status diterbitkan dokumen kependudukan yang perubahan akibat peristiwa peristiwa mensyahkan penting atau kependudukan yang dialami penduduk;

Kerangka sistem hukum dan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan pelaksanaannya merupakan landasan yang sangat kuat

untuk penyelenggaraan admnistrasi kependudukan di Indonesia, akan

tetapi pada tataran implementasi didaerah masih belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam artian Dinas Dukcapil dan Pemerintah Daerah belum menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berserta peraturan pelaksanaannya, untuk dijadikan landasan operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

4. Manajemen pelayanan administrasi kependudukan

Pelayanan Administrasi Kependudukan umumnya belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Pada umumnya mereka menganggap prosedur pengurusan dokumen kependudukan masih panjang (berbelit belit), kurang transparan (masih dipenuhi dengan pengaturan yang tidak jelas), dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik (mudah, murah, cepat, berkeadilan, dan ramah terhadap pelanggan). Hal ini terjadi karena Dinas Dukcapil dan Pemerintah Daerah belum menyesuaikan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanannya;

5. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemampuan SDM memanfaatkan TIK untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya institusi pendidikan dan pelatihan SDM TIK untuk mendukung kegiatan tertib administrasi kependudukan. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur TIK dan kelengkapan sarana pendukungnya menyebabkan belum optimalnya penetrasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ditingkat operasional, standarisasi prosedur penggunaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih rendah;

6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan capaian pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal, hal ini disebabkan tidak adanya kendaraan operasional khusus dalam pelaksanaan pelayanan keliling, sehingga menyulitkan petugas memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan berdampak

terhadap capaian kinerja pelayanan. Idealnya dibutuhkan 3 (Tiga) kendaraan operasional khusus roda empat guna mencapai pelayanan yang maksimal;

7. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan

Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk kesadaran wajib melaporkan setiap perubahan status kependudukannya. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya cakupan data penduduk yang belum memiliki akta-akta catatan sipil.

8. Pandemi Covid-19

Terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 sampai dengan sakarang dan diprediksi pandemi baru berakhir dalam beberapa tahun kedepan menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terganggu yang berakibat terhadap serapan anggaran yang terlambat, terhambatnya rencana pengembangan SDM TIK, terhambatnya realisasi perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah

"TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- KSB Baik adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan prilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akheratnya serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
- 2. Gotong royong yang dalam bahasa tau tana samawa "basiru" merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektivitas inilah yang

menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotongroyong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia;
- 2. KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat;
- 3. KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 4. KSB BAIK dalam kemandirian pangan;
- 5. KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi;
- 6. KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam Misi yang ke 3 (Tiga) yaitu "Mewujudkan KSB Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik". Untuk mendukung Misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan internal perangkat daerah;
- 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- 3. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil;
- 4. Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir.
- Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

MISI : K	SB BAIK dalam peny	elenggaraan pemer	intahan dan pelayan	an publik
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya	Meningkatnya	- Realisasi	Memperkuat tata	Fasilitasi dan
kualitas dan	kualitas pelayanan	Anggaran	kelola administrasi	pembinaan
kuantitas	internal perangkat	- Nilai Sakip	kependudukan	administrasi
pelayanan	daerah			kependudukan
administrasi	Meningkatnya	Persentase		untuk memenuhi
kependudukan	cakupan	penduduk yang		dan melindungi
dan pencatatan	kepemilikan	memiliki		hak-hak penduduk

sipil	dokumen kependudukan	dokumen kependudukan yang lengkap	terkait kepemilikan dokumen kependudukan
	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Repelluuuukali
	Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir	Persentase ketersediaan data konsolidasi bersih	
	Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase instansi/lembaga yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	

3.3. Telaahan Renstra Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas PMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menelaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 adalah **Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan** yang mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna mewujudkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan arah kebijakan tersebut melalui :

- Pengembangan dan Integrasi Sistem
- Perluasan Cakupan Layanan
- > Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan
- Penyempurnaan Regulasi

Program Strategis Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah "Program Tata Kelola Kependudukan" dengan indikator kinerja program sebagai berikut :

 Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 2. Meningkatnya jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan program strategis Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diselenggarakan melalui 3 (Tiga) kegiatan strategis yaitu :

- 1. Pengelolaan, pemanfaatan data informasi kependudukan;
- 2. Pembinaan administrasi kependudukan;
- 3. Pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas PMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program kependudukan dan pencatatan sipil menetapkan tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Adminduk yang baik" dengan sasaran yang ingin dicapai "Meningkatnya masyarakat yang tertib Adminduk", dalam mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan strategi "Peningkatan cakupan pelayanan Adminduk", untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi tersebut ditetapkanlah arah kebijakan yaitu "Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota".

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat selaras dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 – 2040. Dimana kebijakan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan merata yang berbasis pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri yang didukung pembangunan pariwisata dan pertambangan menuju terwujudnya kesejahteraan wilayah yang berkelanjutan.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktorfaktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

A. Faktor Penghambat

 Berdasarkan penataan ruang Kabupaten Sumbawa Barat pada ayat (1)
 huruf (g) Pengelolaan kawasan pertambangan dan industri pendukungnya secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan berimplikasi terhadap tingginya jumlah pendatang dari luar daerah, sehingga menambah kompleknya permasalahan kualitas dan kuantitas data kependudukan;

Letak geografis wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang sedemikian rupa berimplikasi terhadap aksesibilitas penduduk Kabupaten Sumbawa Barat agak sulit, sehingga menyebabkan menurunnya minat untuk mengurus dokumen kependudukan.

B. Faktor Pendorong

Banyaknya pendatang ke wilayah tambang di Kabupaten Sumbawa Barat yang mensyaratkan dokumen kependudukan yang valid untuk diterima menjadi karyawan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Administrasi Kependudukan, yaitu: Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, maka dapat dipetakan isu – isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0 18 pada kondisi akhir semester I tahun 2021 sebesar 91,87 % namun masih rendah pada cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk semua umur sebesar 47,26 % pada akhir tahun 2020;
- 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan;
- 3. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga pengguna melalui perjanjian kerjasama;
- Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah "TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG", dengan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia.
- 2. KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat.
- 3. KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 4. KSB BAIK dalam kemandirian pangan.
- 5. KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi.
- 6. KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam Misi yang ke 3 (Tiga) yaitu KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

5.1. Tujuan Strategis

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 2021 – 2026 yaitu "Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil".

5.2. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut telah ditetapkan Sasaran yang didalamnya menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependdukan dan Pencatatan Sipil. Rumusan **Sasaran** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah;
- 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- 3. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil;
- 4. Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Lengkap dan Mutakhir.
- Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama dan Pemafaatan Data Kependudukan;

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, haruslah didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai pendukung keberhasilan terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Daerah.

Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

N0	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /	TA	RGET K	INERJA	PADA	TAHUN	KE-
			SASARAN	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan		Tingkat Kepuasan Masyarakat Mengenai Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77	80	83	86	89	92
	sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal	Realisasi Anggaran	95	95	95	95	95	95
		Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	ВВ	BB	BB
		Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	95	96	96	97	98	99
		Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	95	95	96	97	98	99
		Meningkatnya ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir	Persentase ketersediaan data konsolidasi bersih	95	95	96	97	98	99
		Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase instansi/lembaga yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	95	95	96	97	98	99

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai Perumusan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan mengindentifikasi strategi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga dapat ditemukan sasaran yang ideal dan objektif.

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan perangkat daerah maka harus dilakukan melalui strategi yang tepat.

Kebijakan pada dasarnya merupakan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Tujuan dan sasaran.

Sebagai aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi dan merupakan penghubung perumusan strategi dan implementasi. dikaitkan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang harus disikapi adalah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran adalah seperti yang tertera pada tabel berikut:



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1.1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
pencatatan sipil			1.2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			1.3	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.1.3	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			1.4	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.4	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			1.5	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.5	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		 Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8 Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	 1.1.6 Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.2.1 Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.2.3 Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.2.4 Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.5 Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.3.1 Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4.1 Meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.5.1 Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

pada ŠKPD 1.6.1 Meningkatnya Dinas atau Ket 1.6.2 Meningkatnya Gedung Kanto 1.7.1 Meningkatnya Sumber Daya. 1.7.2 Meningkatnya Umum Kantor 1.8.1 Meningkatnya Biaya Pemelih Perorangan Di 1.8.2 Meningkatnya Kantor dan Ba 1.8.3 Meningkatnya Kantor dan Ba				
Dinas atau Kend 1.6.2 Meningkatnya F Gedung Kantor 1.7.1 Meningkatnya F Sumber Daya A 1.7.2 Meningkatnya F Umum Kantor 1.8.1 Meningkatnya F Biaya Pemeliha Perorangan Din 1.8.2 Meningkatnya F Kantor dan Ban 1.8.3 Meningkatnya F dan Prasarana			1.5.2	
Gedung Kantor a 1.7.1 Meningkatnya Pe Sumber Daya Air 1.7.2 Meningkatnya Pe Umum Kantor 1.8.1 Meningkatnya Pe Biaya Pemelihara Perorangan Dina: 1.8.2 Meningkatnya Pe Kantor dan Bangi 1.8.3 Meningkatnya Pe dan Prasarana G			1.6.1	Meningkatnya Pe Dinas atau Kenda
Sumber Daya Air of the state of			1.6.2	Meningkatnya Per Gedung Kantor at
Umum Kantor 1.8.1 Meningkatnya Peng Biaya Pemeliharaa Perorangan Dinas at 1.8.2 Meningkatnya Pem Kantor dan Bangur 1.8.3 Meningkatnya Pem dan Prasarana Geo			1.7.1	Meningkatnya Per Sumber Daya Air
Biaya Pemeliharaa Perorangan Dinas a 1.8.2 Meningkatnya Pem Kantor dan Bangur 1.8.3 Meningkatnya Pem dan Prasarana Geo			1.7.2	Meningkatnya Per Umum Kantor
1.8.3 Meningkatnya Pem dan Prasarana Geo			1.8.1	Biaya Pemelihara
dan Prasarana Geo			1.8.2	Meningkatnya Per Kantor dan Bangu
			1.8.3	dan Prasarana Ge

2.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	2.1.1	Meningkatnya Pencatatan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
		2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.1.3	Meningkatnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
				2.1.4	Meningkatnya Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
				2.2.1	Meningkatnya Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
				2.3.1	Meningkatnya pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
				2.3.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				2.3.3	Meningkatnya Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
				2.3.4	Meningkatnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk

3.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	3.1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	3.1.1	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
		3.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	3.1.2	Meningkatnya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
				3.1.3	Meningkatnya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
				3.2.1	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
				3.2.2	Meningkatnya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
				3.2.3	Meningkatnya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
				3.2.4	Meningkatnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
				3.2.5	Meningkatnya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
				3.3.1	Meningkatnya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan

					Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Yang Lengkap dan Mutakhir	4.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.1.1	Meningkatnya Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		4.2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.1.2	Meningkatnya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		4.3	Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Meningkatnya Penyusunan Profil Kependudukan	4.1.3.	Meningkatnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
				4.1.4	Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
				4.1.5	Meningkatnya Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
				4.1.6	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				4.1.7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
				4.2.1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				4.3.1	Meningkatnya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

5.	Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.1	Meningkatnya Pengumpulan Data dan Pamanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 5.1.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3	Meningkatnya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatnya Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatnya Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				5.2.4	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat berfokus pada prioritas kebutuhan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat periode 2021-2026, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk melaksanakan berbagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan yang terbagi dalam urusan wajib program untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pendaftaran Penduduk dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
 - b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan
 Peristiwa Penting
 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
 - Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
 - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
- 4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

- Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi
 Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat

								Ta	rget Kinerja	a Program	dan Keran	gka Penda	ınaan				Unit			
Tujuan	Sasaran	Program/Kegiata n/Sub Kegiatan		Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaia n Awal Tahun Perenca	Tahu (202		Tahun 2 ((2022)	Tahun 3	(2023)	Tahun 4	(2024)	Tahun 5 (2025)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kerja SKPD Penang gung jawab	Lokasi
			(Output)	naan	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan			Tingkat Kepuasan Masyarakat Mengenai Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77	77	9.901. 451.6 03	80	11.00 3.574. 183	83	12.04 8.696. 763	86	13.29 4.031. 601	89	14.5 19.7 33.1 81	92	15.65 0.000. 000	Eselon II	Dinas Dukcapil		
dan pencatatan sipil	Meningkatn ya kualitas pelayanan internal		Realisasi Anggaran	95	95	6.166. 451.6 03	95	6.958. 574.1 83	95	7.693. 696.7 63	95	8.624. 031.6 01	95	9.58 9.73 3.18 1	95	10.44 0.000. 000	Eselon II	Dinas Dukcapil		
	perangkat daerah		Nilai SAKIP	ВВ	ВВ		ВВ		BB		BB		ВВ		BB		Eselon II	Dinas Dukcapil		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	70	6.166. 451.6 03	ВВ	6.958. 574.1 83	BB,	7.693. 696.7 63	ВВ	8.624. 031.6 01	ВВ	9.58 9.73 3.18 1	ВВ	10.44 0.000. 000	Eselon II	Dinas Dukcapil		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	95	95	269.0 00.00 0	95	315.0 00.00 0	95	352.0 00.00 0	95	380.0 00.00 0	95	410. 000. 000	95	445.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6	6 Dok	89.00 0.000	6 Dok	90.00 0.000	6 Dok	92.00 0.000	6 Dok	95.00 0.000	6 Dok	100. 000. 000	6 Dok	110.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	45.00 0.000	1 Dok	50.00 0.000	1 Dok	55.00 0.000	1 Dok	60.0 00.0 00	1 Dok	65.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 Dok	30.00 0.000	1 Dok	45.00 0.000	1 Dok	50.00 0.000	1 Dok	55.00 0.000	1 Dok	60.0 00.0	1 Dok	65.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil		

						1					1		1	1		1
Penyusunan Dokumen	yang disusun											00				
Perubahan RKA-																
SKPD																
Sub Kegiatan												65.0				
Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA	1	1 Dok	40.00	1 Dok	45.00	1 Dok	55.00	1 Dok	60.00	1 Dok	00.0	1 Dok	70.00	Eselon	Dinas
Penyusunan DPA-	 SKPD yang disusun 	1	1 Dok	0.000	1 DOK	0.000	1 DOK	0.000	1 DOK	0.000	1 Dok	00.0	1 DOK	0.000	IV	Dukcapil
SKPD												00				
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen											65.0				
Penyusunan	Perubahan DPA-SKPD	1	1 Dok	40.00	1 Dok	45.00	1 Dok	55.00	1 Dok	60.00	1 Dok	00.0	1 Dok	70.00	Eselon	Dinas
Perubahan DPA-	yang disusun	1	1 Dok	0.000	1 DOK	0.000	1 DOK	0.000	1 DOK	0.000	1 Dok	00.0	1 Dok	0.000	IV	Dukcapil
SKPD	yang albasan											00				
Sub Kegiatan																
Koordinasi dan																
Penyusunan	Jumlah Dokumen			40.00		45.00		50.00		55.00		60.0		65.00	Eselon	Dinas
Laporan Capaian	Monev Kinerja SKPD	4	4 Dok	0.000	4 Dok	0.000	4 Dok	0.000	4 Dok	0.000	4 Dok	00.0	4 Dok	0.000	IV	Dukcapil
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi												00				_
Kinerja SKPD																
Kegiatan	Persentase											2.00				
Administrasi	Pemenuhan Dokumen			3.112.		3.298.		3.481.		3.684.		3.90 4.73		3.995.	Eselon	Dinas
Keuangan	Administrasi	95	95	451.6	95	574.1	95	696.7	95	031.6	95	3.18	95	0.000	III	Dukcapil
Perangkat	Keuangan Perangkat			03		83		63		01		1		00		p
Daerah Sub Kegiatan	Daerah tepat waktu											3.68				
Penyediaan Gaji	Jumlah Laporan Gaji		12	3.042.	12	3.194.	12	3.346.	12	3.514.	12	9.73		3.750.	Eselon	Dinas
dan Tunjangan	dan Tunjangan ASN	12	Laporan	451.6	Laporan	574.1	Laporan	696.7	Laporan	031.6	Laporan	3.18	12	0.000	IV	Dukcapil
ASN	, ,		•	03	,	83	•	63		01	•	1		00		•
Sub Kegiatan																
Pelaksanaan	v											40.0				
Penatausahaan dan	Jumlah laporan verifikasi keuangan	12	12	15.00	12	20.00	12	25.00	12	32.00	12	40.0 00.0	12 Laporan	50.00	Eselon	Dinas
Pengujian/Verifik	SKPD	12	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	00.0	12 Laporan	0.000	IV	Dukcapil
asi Keuangan	SIN D											00				
SKPD																
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan											85.0				
Koordinasi dan	Pelaksanaan Akuntansi	12	12	35.00	12	44.00	12	55.00	12	68.00	12	00.0	12 Laporan	90.00	Eselon	Dinas
Pelaksanaan	SKPD		Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	00		0.000	IV	Dukcapil
Akuntansi SKPD Sub Kegiatan								-		-						
Koordinasi dan																
Penyusunan	Jumlah laporan	1	1	10.00	1.7	25.00	1	35.00	1	45.00	1.7	60.0	1.7	70.00	Eselon	Dinas
Laporan	keuangan akhir tahun	1	Laporan	0.000	1 Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	1 Laporan	00.0	1 Laporan	0.000	IV	Dukcapil
Keuangan Akhir												00				_
Tahun SKPD																
Sub Kegiatan																
Koordinasi dan Penyusunan																
Laporan	Jumlah Laporan		12	10.00	12	15.00	12	20.00	12	25.00	12	30.0		35.00	Eselon	Dinas
Keuangan	Keuangan Bulanan	12	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.00	12 Laporan	0.000	IV	Dukcapil
Bulanan/Triwulan					1						1	00				
an/Semesteran																
SKPD															I	

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi barang milik daerah Tepat Waktu	95	95	10.00 0.000	95	15.00 0.000	95	25.00 0.000	95	30.00 0.000	95	40.0 00.0 00	95	45.00 0.000	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	4 Laporan	10.00 0.000	4 Laporan	15.00 0.000	4 Laporan	25.00 0.000	4 Laporan	30.00	4 Laporan	40.0 00.0 00	4 Laporan	45.00 0.000	ESelon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat Waktu	95	95	10.00 0.000	95	15.00 0.000	95	20.00 0.000	95	25.00 0.000	95	30.0 00.0 00	95	35.00 0.000	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12	12 Laporan	10.00 0.000	12 Laporan	15.00 0.000	12 Laporan	20.00 0.000	12 Laporan	25.00 0.000	12 Laporan	30.0 00.0 00	12 Laporan	35.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	95	95	35.00 0.000	95	55.00 0.000	95	65.00 0.000	95	85.00 0.000	95	105. 000. 000	95	120.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	100 Buah	10.00 0.000	110 Buah	20.00 0.000	120 Buah	25.00 0.000	130 Buah	35.00 0.000	135 Buah	45.0 00.0 00	135 Buah	55.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12	12 Laporan	25.00 0.000	12 Laporan	35.00 0.000	12 Laporan	40.00 0.000	12 Laporan	50.00 0.000	12 Laporan	60.0 00.0 00	12 Laporan	65.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	95	95	1.700. 000.0 00	95	2.000. 000.0 00	95	2.400. 000.0 00	95	3.000. 000.0 00	95	3.60 0.00 0.00 0	95	4.200. 000.0 00	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	4	4 Unit	1.200. 000.0 00	4 Unit	1.300. 000.0 00	4 Unit	1.400. 000.0 00	4 Unit	1.500. 000.0 00	4 Unit	1.60 0.00 0.00 0	4 Unit	1.700. 000.0 00	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	21	21 Unit	500.0 00.00	25 Unit	700.0 00.00	25 Unit	1.000. 000.0	25 Unit	1.500. 000.0	25 Unit	2.00 0.00	25 Unit	2.500. 000.0	Eselon IV	Dinas Dukcapil

		T		1	_			1		1							
	dan Prasarana Gedung Kantor	Kantor atau Bangunan yang diadakan			0		0		00		00		0.00		00		
	atau Bangunan	,g															
	Lainnya																
	Kegiatan	Persentase															
	Penyediaan Jasa	Pemenuhan			820.0		880.0		925.0		970.0		1.02 5.00		1.100.	F 1	D.
	Penunjang Urusan	Kebutuhan Jasa	100	95	00.00	95	00.00	95	00.00	95	00.00	95	0.00	95	0.000	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Pemerintahan	Penunjang Perangkat Daerah			0		0		0		0		0		00		Duncupii
_	Daerah	Dactan															
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa				150.0		200.0		225.0		250.0		275.		300.0		
	Komunikasi,	Jumlah Jasa yang disediakan	3	3 Jasa	00.00	3 Jasa	00.00	3 Jasa	00.00	3 Jasa	00.00	3 Jasa	000.	3 Jasa	00.00	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sumber Daya Air	uiscuiakaii			0		0		0		0		000		0	1 V	Биксари
_	dan Listrik Sub Kegiatan																
	Penyediaan Jasa	Jumlah Tenaga Administrasi Pelayanan	29	29	670.0 00.00	29 Orang	680.0 00.00	29	700.0 00.00	29	720.0 00.00	29 Orang	750. 000.	29Orang	800.0 00.00	Eselon	Dinas
	Pelayanan Umum	Umum Kantor	29	Orang	0	29 Orang	0	Orang	0	Orang	0	29 Orang	000.	29Orang	0	IV	Dukcapil
_	Kantor Kegiatan																
	Pemeliharaan																
	Barang Milik	Persentase barang			210.0		380.0		425.0		450.0		475.		500.0	Englan	Dimon
	Daerah Penunjang	milik daerah yang	95	95	00.00	95	00.00	95	00.00	95	00.00	95	000.	95	00.00	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Urusan	dipelihara			0		0		0		0		000		0		Duncupii
	Pemerintahan																
_	Daerah Sub Kegiatan																
	Penyediaan Jasa																
	Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan					100.0		125.0		150.0		175.		200.0		
	Pemeliharaan dan	Dinas dan Jabatan yang	56	56 Unit	50.00	58 unit	00.00	58 unit	00.00	60 unit	00.00	60 unit	000.	60 unit	00.00	Eselon	Dinas
	Pajak Kendaraan	dipelihara			0.000		0		0		0		000		0	IV	Dukcapil
	Perorangan Dinas																
	atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	Sub Kegiatan:																
	Pemeliharaan/Reh	Loudel Codens V.			100.0		200.0		200.0		200.0		200.		200.0	Feeler	Dimon
	abilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	1 unit	00.00	1 unit	00.00	1 unit	00.00	1 unit	00.00	1 unit	000.	1 unit	00.00	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Bangunan	, 8			0		0		0		0		000		0		2 and upin
	Lainnya																
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh																
	abilitasi Sarana																
	dan Prasarana								100.6		100.6		100		100.6		
	Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarpras Gedung	16	16 unit	60.00	20 unit	80.00	25 unit	100.0 00.00	25 unit	100.0 00.00	25 unit	100. 000.	15 unit	100.0 00.00	Eselon	Dinas
	Lainnya	Kantor yang dipelihara	10	10 unit	0.000	20 um	0.000	25 umt	0	25 umt	0	25 um	000.	15 unit	0	IV	Dukcapil

Meningkatn ya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudu kan		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	95	95	1.240. 000.0 00	95	1.310. 000.0 00	96	1.470. 000.0 00	97	1.585. 000.0 00	98	1.69 0.00 0.00 0	99	1.820. 000.0 00	Eselon II	Dinas Dukcapil
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	95	95	1.240. 000.0 00	95	1.420. 000.0 00	96	1.470. 000.0 00	97	1.585. 000.0 00	98	1.69 0.00 0.00 0	99	1.820. 000.0 00	Eselon II	Dinas Dukcapil
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	95	95	710.0 00.00 0	95	745.0 00.00 0	96	790.0 00.00 0	97	835.0 00.00 0	98	880. 000. 000	99	950.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan atas pendaftaran penduduk	25.000	25.000	510.0 00.00 0	25.000	540.0 00.00 0	26.000	570.0 00.00 0	27.000	600.0 00.00 0	28.000	630. 000. 000	29.000	680.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pindah datang WNI dan WNA yang diterbitkan	4000	4000	100.0 00.00 0	4000	100.0 00.00 0	4000	110.0 000.0 00	4000	120.0 00.00 0	4000	130. 000. 000	4000	140.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan yang terdata	200	200	50.00 0.000	200	50.00 0.000	200	50.00 0.000	200	50.00 0.000	200	50.0 00.0 00	200	50.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Perkembangan pendaftaran penduduk	1 Dokume n	1	50.00 0.000	1	55.00 0.000	1	60.00 0.000	1	65.00 0.000	1	70.0 00.0 00	1	80.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	35	35	180.0 00.00 0	40	180.0 00.00 0	45	200.0 00.00 0	50	220.0 00.00 0	60	230. 000. 000	70	240.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait	Jumlah dokumen Kartu Identitas Anak yang diadakan	10000	10000 Keping	180.0 00.00 0	10000 Keping	180.0 00.00 0	11000 Keping	200.0 00.00 0	12000 Keping	220.0 00.00 0	14000	230. 000. 000	16000 Keping	240.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil

	Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan																
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	95	95	350.0 00.00 0	95	440.0 00.00 0	96	480.0 00.00 0	97	530.0 00.00 0	98	580. 000. 000	99	630.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan	130 Kali	130 Kali	100.0 00.00 0	130 Kali	125.0 00.00 0	130 Kali	150.0 00.00 0	130 Kali	175.0 00.00 0	130 Kali	200. 000. 000	130 Kali	225.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi antar lembaga yang diselenggarakan	2	2 Kali	50.00 0.000	4 Kali	100.0 00.00 0	4 Kali	100.0 00.00 0	4 Kali	110.0 00.00 0	4 Kali	120. 000. 000	4 Kali	130.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	95	95 Orang	100.0 00.00 0	95 Orang	110.0 00.00 0	96 Orang	120.0 00.00 0	97 Orang	130.0 00.00 0	98 Orang	140. 000. 000	99 Orang	150.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	100 Orang	100	100.0 00.00 0	100	105.0 00.00 0	100	110.0 00.00 0	100	115.0 00.00 0	100	120. 000. 000	100	125.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Meningkat nya Cakupan Kepemilik an Dokumen Pencatatan Sipil		Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil		95	800.0 00.00 0	95	935.0 00.00 0	96	980.0 00.00 0	97	1.045. 000.0 00	98	1.11 0.00 0.00 0	99	1.175. 000.0 00	Eselon II	Dinas Dukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	95	95	800.0 00.00 0	95	935.0 00.00 0	96	980.0 00	97	1.045. 000.0 00	98	1.11 0.00 0.00 0	99	1.175. 000.0 00	Eselon II	Dinas Dukcapil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	95	95	300.0 00.00 0	95	320.0 00.00 0	95	340.0 00.00 0	95	360.0 00.00 0	95	380. 000. 000	95	400.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan	5000 Dok	5000	150.0 00.00 0	5000	160.0 00.00 0	5500	170.0 00.00 0	5500	180.0 00.00 0	5500	190. 000. 000	6000	200.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen perkembangan pencatatan sipil	1 Dok	1	50.00 0.000	1	55.00 0.000	1	60.00 0.000	1	65.00 0.000	1	70.0 00.0 00	1	75.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Akta kematian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan	1000 Dok	1000	100.0 00.00 0	1010	105.0 00.00 0	1020	110.0 00.00 0	1030	115.0 00.00 0	1041	120. 000. 000	1041	125.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan pencatatan sipil yang diterbitkan	95	95	400.0 00.00 0	95	515.0 00.00 0	95	540.0 00.00 0	95	585.0 00.00 0	95	630. 000. 000	95	675.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	2 Kali	2	50.00 0.000	4	100.0 00.00 0	4	100.0 00.00 0	4	110.0 00.00 0	4	120. 000. 000	4	130.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristi wa Kependudukan dan Pencatatan Peristi wa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan	130 Kali	130	100.0 00.00 0	130	100.0 00.00 0	130	110.0 00.00 0	130	120.0 00.00 0	130	130. 000. 000	130	140.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggaraka n Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	2	50.00 0.000	4	100.0 00.00 0	4	100.0 00.00 0	4	110.0 00.00 0	4	120. 000. 000	4	130.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil

	Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil Sub Kegiatan	Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	100 Orang	100	100.0 00.00 0	100	105.0 00.00 0	100	110.0 00.00 0	100	115.0 00.00 0	100	120. 000. 000	100	125.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	100	00.00	100	00.00	100	00.00	100	00.00	100	000.	100	00.00	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil	95	95	100.0 00.00 0	95	100.0 00.00 0	95	100.0 00.00 0	95	100.0 00.00 0	95	100. 000. 000	95	100.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggaraka n Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Yang Dilaksanakan	8 Kali	8	100.0 00.00 0	8	100.0	8	100.0 00.00 0	8	100.0 00.00 0	8	100. 000. 000	8	100.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Meningkat nya ketersedia an data yang lengkap dan mutakhir		Persentase data konsolidasi bersih		95	945.0 00.00 0	95	1.010. 000	96	1.075. 000.0 00	97	1.170. 000.0 00	98	1.22 0.00 0.00 0	99	1.275. 000.0 00	Eselon II	Dinas Dukcapil

Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data konsolidasi bersih	95	95	725.0 00.00 0	95	780.0 00.00 0	96	835.0 00.00 0	97	920.0 00.00 0	98	960. 000. 000	99	1.005. 000.0 00	Eselon II	Dinas Dukcapil
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan	95	95	515.0 00.00 0	95	550.0 00.00 0	96	585.0 00.00 0	97	640.0 00.00 0	98	660. 000. 000	99	685.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi	5 Kali	5	150.0 00.00 0	6	175.0 00.00 0	7	200.0 00.00 0	8	225.0 00.00 0	9	235. 000. 000	10	250.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	120.0 00.00 0	100	120. 000. 000	100	120.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjaw abkan	Jumlah Pemutakhiran Data Kependudukan Yang Diselenggarakan	1 Kali	1	165.0 00.00 0	1	165.0 00.00 0	1	165.0 00.00 0	1	165.0 00.00 0	1	165. 000. 000	1	165.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	95	95	50.00 0.000	95	60.00 0.000	95	70.00 0.000	95	80.00 0.000	95	90.0 00.0 00	95	100.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	4 Kali	4	50.00 0.000	4	60.00 0.000	4	70.00 0.000	4	80.00 0.000	4	90.0 00.0 00	4	100.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan yang telah dikonsolidasikan oleh Dukcapil	95	95	310.0 00.00 0	95	325.0 00.00 0	95	340.0 00.00 0	95	365.0 00.00 0	95	380. 000. 000	95	395.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil

	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diterbitkan	2 Dok	2	110.0 00.00 0	2	110.0 00.00 0	2	110.0 00.00 0	2	120.0 00.00 0	2	120. 000. 000	2	120.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah inventarisasi data	12 Dok	12	50.00 0.000	12	60.00 0.000	12	70.00 0.000	12	80.00 0.000	12	90.0 00.0 00	12	100.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase profil data kependudukan kabupaten	95	95	220.0 00.00 0	95	230.0 00.00 0	96	240.0 00.00 0	97	250.0 00.00 0	98	260. 000. 000	99	270.0 00.00 0	Eselon II	Dinas Dukcapil
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan	95	95	220.0 00.00 0	95	230.0 00.00 0	95	240.0 00.00 0	95	250.0 00.00 0	95	260. 000. 000	95	270.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Agregat Yang Diterbitkan	170 Buku	170	120.0 00.00 0	170	120.0 00.00 0	170	120.0 00.00 0	170	120.0 00.00 0	170	120. 000. 000	170	120.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan	25 Buku	25	100.0 00.00 0	25	110.0 00.00 0	25	120.0 00.00 0	25	130.0 00.00 0	25	140. 000. 000	25	150.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Meningkat nya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaat an Data Kependud ukan		Persentase Instansi/Lembaga Yang Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		95	750.0 00.00 0	95	790.0 00.00 0	96	830.0 00.00 0	97	870.0 00.00 0	98	910. 000. 000	99	950.0 00.00 0	Eselon II	Dinas Dukcapil
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data konsolidasi bersih	95	95	750.0 00.00 0	95	790.0 00.00 0	96	830.0 00.00 0	97	870.0 00.00 0	98	910. 000. 000	99	950.0 00.00 0	Eselon II	Dinas Dukcapil
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan	Persentase Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan yang	95	95	150.0 00.00 0	95	155.0 00.00 0	95	160.0 00.00 0	95	165.0 00	95	170. 000. 000	95	175.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil

dan Penyajian	telah dikonsolidasikan															
Database Kependudukan	oleh Dukcapil															
Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan	5 Dok	5	150.0 00.00 0	5	155.0 00.00 0	10	160.0 00.00 0	10	165.0 00.00 0	10	170. 000. 000	10	175.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan	95	95	425.0 00.00 0	95	450.0 00.00 0	96	475.0 00.00 0	97	500.0 00.00 0	98	525. 000. 000	99	550.0 00.00 0	Eselon III	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan	1 Dokume n	1	100.0 00.00 0	1	110.0 00.00 0	1	120.0 00.00 0	1	130.0 00.00 0	1	140. 000. 000	1	150.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	70 Orang	70	150.0 00.00 0	70	155.0 00.00 0	70	160.0 00.00 0	70	165.0 00.00 0	70	170. 000. 000	70	175.0 00.00 0	Eselon IV	Dinas Dukcapil
Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	70 Kali	70	150.0 00.00 0	70	155.0 00.00 0	70	160.0 00.00 0	70	165.0 00.00 0	70	170. 000. 000	70	175.0 00.00 0	Eselon IV	Dukcapil
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Data Balikan	10 Laporan	10	25.00 0.000	20	30.00 0.000	20	35.00 0.000	20	40.00 0.000	20	45.0 00.0 00	20	50.00 0.000	Eselon IV	Dinas Dukcapil

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing —masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

- 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
- 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

- 1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
- 2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
- 3. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
- 4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Kondisi		Targ	et Capaia	n Setiap	Tahun		Kondisi
NO	Indikator	Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Realisasi Anggaran	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Nilai SAKIP	ВВ	BB	BB	BB	BB	BB	BB	ВВ
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	95	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %	99%	99 %
3	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	95	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %	99%	99 %
4	Persentase ketersediaan data konsolidasi bersih	95	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %	99%	99 %
5	Persentase instansi/lembaga yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	95	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	99 %

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026 ini disusun untuk menentukan arah pembangunan Kependudukan dan pencatatan sipil 5 tahun ke depan sekaligus

merupakan sarana untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan administrasi

kependudukan dalam rangka mendukung program-program pembangunan

Kabupaten Sumbawa Barat.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan

mengukur kinerja pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

serta sebagai tolak ukur. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan dapat diterapkan

dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan

azas-azas kebenaran dan moralitas.

Dalam implementasinya, segenap pihak yang terlibat hendaknya juga duduk

bersama dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam tahapan

monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan dapat mendongkrak Misi ke 3 (Tiga) Kepala Daerah, yaitu "KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik".

Taliwang, 24 September 2021

NNAS KEPENDUT

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

67

Kabupaten Sumbawa Barat,

IBRAHIM, S.Sos, MM

Pemtina Utama Muda (IV.c) NIP 196510281986111001

Renstra Dinas Dukcapil Sumbawa Barat 2021 - 2026

KERTAS KERJA / CASCADING RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

		Tujua	n : Meningka	tnya kualitas dan k	uantitas pelaya	nan administrasi ke	ependudukan	n dan pencatatan si	ipil					
		Ī		2021		2022	İ	2023	Ī	2024		2025		2026
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Tingkat Kepuasan Masyarakat Mengenai Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Survei Kepuasan Masyarakat	%	77	9,901,451,603	80	11,003,574,183	83	12,048,696,763	86	13,294,031,601	89	14,519,733,181	92	15,650,000,000
SEKRETARIAT	ı													
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan interna	al perangkat daerah													
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	2021 Rp.	TARGET	2022 Rp.	TARGET	2023 Rp.	TARGET	2024 Rp.	TARGET	2025 Rp.	TARGET	2026 Rp.
Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%	95	6,166,451,603	95	6,958,574,183	95	7,693,696,763	95	8,624,031,601	95	9,589,733,181	95	10,440,000,000
Nilai SAKIP	Kategori Nilai SAKIP	BB												
Sub Bagian Perencanaan														
Program: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	N DAERAH KAB/KOTA	•	_				1		•					
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%	TARGET 95	Rp. 269,000,000	TARGET 95	Rp. 315,000,000	TARGET 95	Rp. 352,000,000	TARGET 95	Rp. 380,000,000	TARGET 95	Rp. 410,000,000	TARGET 95	Rp. 445,000,000
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Inspektorat	Skor	77		80		83		86		89		92	
		SKUI	- ''		00	1	0.5		00		03		32	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evalu	uasi Kinerja Perangkat Daerah													
		1		2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dikali 100	%	95	269,000,000	95	315,000,000	95	352,000,000	95	380,000,000	95	410,000,000	95	445,000,000
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaa	n Perangkat Daerah						I	I		1		Į.		
INDIVATOR CUR VECIATAN	META INDIKATOR	CATHAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	6	89,000,000	6	90,000,000	6	92,000,000	6	95,000,000	6	100,000,000	6	110,000,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokun	nen RKA-SKPD		l .				L		<u> </u>					
INDIVATOR OUR VEGUATATI	META INDUCATOR	047114**		2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		Dokumen	1	30,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokun	nen Perubahan RKA-SKPD													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
disusun		Dokumen	1	30,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-S	SKPD													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun		Deleter	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perub	ahan DPA-SKPD	Dokumen	1	40,000,000	1	45,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000
				2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		l				٠٠٣.		.,,		.,,,,	.,			.,,,,

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang	T	7	i	i	ı	ı	Ī	1	Ì	1	Ī	1 1	Ì	1
disusun		Dokumen	1	40,000,000	1	45,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000
<mark>Sub Kegiatan</mark> : Koordinasi dan Penyusunan Lapor	ran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real	isasi Kinerja	SKPD	-		•				•				
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen Monev Kinerja SKPD		Dokumen	4	40,000,000	4	45,000,000	4	50,000,000	4	55,000,000	4	60,000,000	4	65,000,00
Sub Bagian Keuangan														
Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	N DAERAH KAB/KOTA													
				2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%	95	3,112,451,603	95	3,298,574,183	95	3,481,696,763	95	3,684,031,601	95	3,904,733,181	95	3,995,000,00
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Inspektorat	Skor	77		80		83		86		89		92	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Dae	rah	1			1									
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	Jumlah Dokumen keuangan		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
reiserlase reinerladi Dokumer Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	perangkat daerah dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen keuangan Perangkat Daerah dikali 100	%	95	3,112,451,603	95	3,298,574,183	95	3,481,696,763	95	3,684,031,601	95	3,904,733,181	95	3,995,000,000
<mark>Sub Kegiatan</mark> : Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	SN		•		•									
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
	iii 277 ii 1010 CT OT		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan	12	3,042,451,603	12	3,194,574,183	12	3,346,696,763	12	3,514,031,601	12	3,689,733,181	12	3,750,000,00
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan F	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	l	1	2021	1	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah laporan verifikasi keuangan SKPD		Laporan	12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	32,000,000	12	40,000,000	12	50,000,00
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akun	tansi SKPD		<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I	==,,,,,,,,	<u> </u>		·-	1	<u> </u>	,,	·	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDUCATOR	04711441		2021		2022		2023		2024		2025		2026
	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan	12	35,000,000	12	44,000,000	12	55,000,000	12	68,000,000	12	85,000,000	12	90,000,00
<mark>Sub Kegiatan</mark> : Koordinasi dan Penyusunan Lapor	ran Keuangan Akhir Tahun SKPD													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Lumbah langgan kayangan akhir tahun			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah laporan keuangan akhir tahun		Laporan	1	10,000,000	1	25,000,000	1	35,000,000	1	45,000,000	1	60,000,000	1	70,000,00
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Lapor	ran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	emesteran SK	(PD											
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan		Laporan	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000
Sub Bagian Umum dan Kanagawaia	•													
Sub Bagian Umum dan Kepegawaiai Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA														
	1			2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%	95	2,785,000,000	95	3,345,000,000	95	3,860,000,000	95	4,560,000,000	95	5,275,000,000	95	6,000,000,00
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Inspektorat	Skor	77		80		83		86		89		92	
<mark>Kegiatan</mark> : Administrasi Barang Milik Daerah pada	Perangkat Daerah		_											
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
		1	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.

Rp.

Rp.

Persentase pemenuhan dokumen administrasi barang milik daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlak kebutuhan dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	%	95	10,000,000	95	15,000,000	95	25,000,000	95	30,000,000	95	40,000,000	95	45,000,000
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah	h pada SKPD		1				ı				1			
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Laporan	4	10,000,000	4	15,000,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	40,000,000	4	45,000,000
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Da	aerah		l				L				l			
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.										
Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat Waktu	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah dikali 100	%	95	10,000,000	95	15,000,000	95	20,000,000	95	25,000,000	95	30,000,000	95	35,000,000
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Adminis	strasi Kepegawaian		•								•			
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
lumlah Laporan Pengelolaan Administrasi			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Laporan	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			1				ı				1			
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
		071107111	TARGET	Rp.										
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang tersedia dibagi dengan Kebutuhan Perangkat Daerah dikali 100	%	95	35,000,000	95	55,000,000	95	65,000,000	95	85,000,000	95	105,000,000	95	120,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Lis	strik/Penerangan Bangunan Kantor		,			•				•	•			
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2025
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan			TARGET	Rp.										
Bangunan Kantor yang disediakan		Buah	100	10,000,000	110	20,000,000	120	25,000,000	130	35,000,000	135	45,000,000	135	55,000,000
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada	SKPD	1	1	0004			1	0000	1	0004	1	2025		0000
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	2021 Rp.	TARGET	2022 Rp.	TARGET	2023 Rp.	TARGET	2024 Rp.	TARGET	2025 Rp.	TARGET	2026 Rp.
Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD		Lanaran		-	12				12			-	12	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja	ang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	25,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000
				2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.										
Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dibagi jumlah barang milik daerah pada Perangkat Daerah dikali 100	%	95	1,700,000,000	95	2,000,000,000	95	2,400,000,000	95	3,000,000,000	95	3,600,000,000	95	4,200,000,000
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatai	1					ļ.	'		•				
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan		Ulais	TARGET	Rp.										
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana G	 Sedung Kantor atau Bangunan Lainn	Unit ya	1 4	1,200,000,000	4	1,300,000,000	l 4	1,400,000,000	4	1,500,000,000	4	1,600,000,000	4	1,700,000,000
	T J			2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.										
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan		Unit	21	500,000,000	25	700,000,000	25	1,000,000,000	25	1,500,000,000	25	2,000,000,000	25	2,500,000,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pen	merintahan Daerah		1					1			1			
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.										

Paragraph Dearth yang pipilahang dataga pimahang milik daming milik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	tersedia dibagi dengan kebutuhan penunjang pada Perangkat Daerah dikali 100	%	95	820,000,000	95	880,000,000	95	925,000,000	95	970,000,000	95	1,025,000,000	95	1,100,000,000
MICH AND REGATA SATUAL S	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum	nber Daya Air dan Listrik		1	2024	1	2000		0000		2004		0005		0000
The Propose of the P	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARCET			1	TARCET	1	TARCET	1			TARCET	
Migra (Note Note 1)	Jumlah Jasa yang disediakan		.lasa		-		ļ				-				
## PRODUCTION BUSINESSATION STUDY		n Kantor	ouou		100,000,000		200,000,000	J	223,000,000	•	250,000,000		270,000,000	J	300,000,000
March Marc					2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
Column C	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
MICHANOLYCORE DISTORATION MICHANOLYCORE			Orang	29	670,000,000	29	680,000,000	29	700,000,000	29	720,000,000	29	750,000,000	29	800,000,000
MICHA FOR KEGAT AN META MONATOR SATURAL PROPERTY SATURAL				1	L										
Name of the properties of the	INDUCATOR (COLATAN)	META INDUCATOR	04711441		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Part	INDIKATOR REGIATAN	METAINDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
MICHATOR SUB KEGATAN META NOIKATOR SATUAN TARGET R.P. TARGET R.P	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Perangkat Daerah yang dipelihara dibagi jumlah barang milik daerah	%	95	210,000,000	95	380,000,000	95	425,000,000	95	450,000,000	95	475,000,000	95	500,000,000
MICHATOR SUN KEGATAN META NDIKATOR STUDE No. 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bi	iaya Pemeliharaan dan Pajak Kendara	an Peroranga	an Dinas atau	Kendaraan Dinas	Jabatan	I				l I		l l		
MICHATOR SUM ACQUISING PROMEMBASA PENDELLA MICHATOR SUM ACQUISING SUM	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATIIAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Section Sect		WETA INDICATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Section Percentition Percentit			Unit	56	50,000,000	58	100,000,000	58	125,000,000	60	150,000,000	60	175,000,000	60	200,000,000
MOINATOR SUB KEIGATAN META HOINATOR SATUAN METO R.P. C. ARGET R.P. ARGET R.P. C. A	•	Kantor dan Bangunan Lainnya		ı	I.	I					Į.				
March Marc	INDIKATOR SUR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
NOKATOR SUB KEGITAN META NOKATOR SATUAN TARGET SATUAN		META INDIRATOR	SATUAN	TARGET	-	TARGET		TARGET		TARGET	-	TARGET	_	TARGET	
NDIKATOR SUB KEGIATAN META NDIKATOR SATUAN TARGET R.p. TARGET R.				<u> </u>	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
MOINATOR SUB REGIATAN META NDIKATOR SATUAN TARGET Rp.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana o	dan Prasarana Gedung Kantor atau B	angunan Lair	nnya	2024	1	2022		2022		2024		2025		2026
Submark Surprise Gedung Kantor yang dipeliharia Unit 16 60,000,000 20 80,000,000 25 100,000,000 25 2023 2024 2025	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARCET			1	TARCET	1	TARCET	1			TARCET	
Signary Sign	Jumlah Sarpras Gedung Kantor yang dipelihara		Unit		-						-				
MOIKATOR SASAKAN META INDIKATOR SATUAN META INDIKATOR SATUAN META INDIKATOR SATUAN SAT	Sasaran : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Do	kumen Kependudukan		T	2021	T :	2022		2023		2024		2025		2026
Personal penduduk yang memilik dokumen kependuduk dikali seriatus MeTA INDIKATOR SATUAN Personal sedokumen kependudukan yang diterbitah Dokumen kependu	INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	
NDIKATOR PROGRAM META INDIKATOR SATUAN	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali	%	95		95		96		97	1,585,000,000	98			-
NDIKATOR PROGRAM META INDIKATOR SATUAN	SERVE IDENTITAS DENDITORIA														
NDIKATOR PROGRAM META INDIKATOR SATUAN SATUAN TARGET Rp. TARGET R															
NDIKATOR ROGRAM					2021		2022		2023		2024		2025		2026
Memiliki dokumen kependudukan yang lengkap Memiliki dokumen kependudukan % 95 890,000,000 95 900,000,000 96 1,040,000,000 97 1,125,000,000 98 1,200,000,000 99 1,295,000,000	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	
INDIKATOR KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN META INDIKATOR SUB KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN META INDIKATOR SATUAN SATUA	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	memiliki dokumen kependudukan	%	95	890,000,000	95	900,000,000	96	1,040,000,000	97	1,125,000,000	98	1,200,000,000	99	1,295,000,000
INDIKATOR KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN META INDIKATOR SUB KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN META INDIKATOR SATUAN SATUA															
INDIKATOR KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN TARGET Rp.	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0004	1	2000		0000		0004		0005		
Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan Dibagi Jumlah Pendudukan yang diterbitkan Dibagi Jumlah Penduduk Yang mengajukan Penduduk Yang mengajukan kependudukan Dikali seratus	INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET			1	TARGET		TARGET	1	TARGET		TARCET	
INDIKATOR SUB KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	Yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Penduduk Yang mengajukan pendaftaran atas Dokumen	%		-						-				
INDIKATOR SUB KEGIATAN META INDIKATOR SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Sub Kegiatan : Pencatatan. Penatausahaan dan Pe	enerbitan Dokumen atas Pendaftaran	Penduduk												_
INDIKATOR SUB KEGIATAN I METATNDIKATOR I SATUAN					2021		2022		2023		2024		2025		2026
	I INDIKATOR SUB KEGIATAN														2020

Jumlah penerbitan dokumen kependudukan atas		Dokumen	25,000	510,000,000	25,000	540,000,000	26,000	570,000,000	27,000	600,000,000	28,000	630,000,000	29,000	680,000,000
pendaftaran penduduk		Dokumen	25,000	510,000,000	25,000	340,000,000	26,000	570,000,000	27,000	600,000,000	20,000	630,000,000	29,000	880,000,000
Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk			<u> </u>	2021		2022	1	2023		2024	l	2025	1	2026
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	2026 Rp
Persentase dokumen Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Jumlah dokumen Kartu Identitas Anak yang diterbitkan dibagi dengan jumlah anak dibawah 17 tahun dikali seratus	%	35	180,000,000	40	180,000,000	45	200,000,000	50	220,000,000	60	230,000,000	70	240,000,000
Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependuduk	on coloin Diometro KTD El Formulio d	lan Bula tank	eit Dandelten	an Danduduk asau	ai dannan Kabu	t b								
Sub Regiatan : Pengadaan Dokumen Rependuduk	an selain Biangko KTP-EI, Formulir, d	an buku terk		2021		2022	l	2023		2024	l	2025	1	2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	2026 Rp
Jumlah dokumen Kartu Identitas Anak yang diadakan		Keping	10,000	180,000,000	10,000	180,000,000	11,000	200,000,000	12,000	220,000,000	14,000	230,000,000	16,000	240,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudu	ık													
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
		OATOAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Penduduk Yang mengajukan pendaftaran atas Dokumen Kependudukan Dikali seratus	%	95	200,000,000	95	235,000,000	96	270,000,000	97	305,000,000	98	340,000,000	99	375,000,000
Sub Kegiatan : Pelayanan secara Aktif Pendaftaran	n Peristiwa Kependudukan dan Penca	tatan Peristi	wa Penting To	erkait Pendaftaran	Penduduk		•							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan		Kali	130	100,000,000	130	125,000,000	130	150,000,000	130	175,000,000	130	200,000,000	130	225,000,000
Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1	2021		2022	l	2023		2024	1	2025	1	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	2026 Rp
handahan andara salahan kanada firana andari da				100,000,000		-				·		•	99	150,000,000
Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran penduduk		orang	95	100,000,000	95	110,000,000	96	120,000,000	97	130,000,000	98	140,000,000	99	150,000,000
SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATA/ Program : Pendaftaran penduduk	AN PENDUDUK													
Program : rendartaran penduduk			1	2021	:	2022	1	2023		2024	1	2025	1	2026
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali seratus	%	95	350,000,000	95	410,000,000	96	430,000,000	97	460,000,000	98	490,000,000	99	525,000,000
Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1				1				1			
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Kependudukan		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
, cromase condition rependedical yang diconition	Yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Penduduk Yang mengajukan pendaftaran atas Dokumen Kependudukan Dikali seratus	%	95	200,000,000	95	205,000,000	96	220,000,000	97	235,000,000	98	250,000,000	99	270,000,000
Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permane	en dan Rentan Administrasi Kependu	dukan												
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025	ļ	2026
Jumlah penduduk non permanen dan rentan			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
administrasi kependudukan yang terdata		Orang	200	50,000,000	200	50,000,000	200	50,000,000	200	50,000,000	200	50,000,000	200	50,000,000
Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Pe	enerbitan Dokumen atas Pelaporan Pe	eristiwa Kepe									1			
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	2021 Rp.	TARGET	2022 Rp.	TARGET	2023 Rp.	TARGET	2024 Rp.	TARGET	2025 Rp.	TARGET	2026 Rp
Jumlah dokumen pindah datang WNI dan WNA yang diterbitkan		Dokumen	4,000	100,000,000	4000	100,000,000	4000	110,000,000	4000	120,000,000	4000	130,000,000	4000	140,000,000
Sub Kegiatan : Pengumpulan, Analisis, dan Disem	inasi Data terkait Pendaftaran dan Pe	rkembangan	Penduduk											
				2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp

 Jumlah Dokumen Perkembangan pendaftaran
 Dokumen
 1
 50,000,000
 1
 55,000,000
 1
 60,000,000
 1
 65,000,000
 1
 70,000,000
 1
 80,000,000

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudu	ık													
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
		OATOAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Penduduk Yang mengajukan pendaftaran atas Dokumen Kependudukan Dikali seratus	%	95	150,000,000	95	205,000,000	96	210,000,000	97	225,000,000	98	240,000,000	99	255,000,000
Sub Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemerii	ntah dan Lembaga Non-Pemerintah d	Kabupaten/	Kota dalam P	enertiban Pelayana	n Pendaftaran	Penduduk	•	•				•		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
	III I I I I I I I I I I I I I I I I I	OATOAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah koordinasi antar lembaga yang diselenggarakan		kali	2	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	120,000,000	4	130,000,000
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas	si Kepada Pemangku Kepentingan da	n Masyaraka					•				,		,	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
hardaharan da aran da ar			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	1	Orang	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,000,000	100	115,000,000	100	120,000,000	100	125,000,000
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN	SIPIL													
Sasaran : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dol	kumen Pencatatan Sipil													
INDIVATOR CORP.	META INC.	0.4.7		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk dikali seratus	%	95	800,000,000	95	935,000,000	96	980,000,000	97	1,045,000,000	98	1,110,000,000	99	1,165,000,000
SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN Program : Pencatatan Sipil														
				2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk dikali seratus	%	95	450,000,000	95	520,000,000	96	550,000,000	97	590,000,000	98	630,000,000	99	670,000,000
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil			•				•							
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk yang mengajukan pendaftaran atas dokumen pencatatan sipil dikali seratus	%	95	200,000,000	95	215,000,000	96	230,000,000	97	245,000,000	98	260,000,000	99	275,000,000
Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Pe	enerbitan Dokumen atas Pelaporan Pe	ristiwa Pent	ing											
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan	inesi Dete Remestat Ciril	Dokumen	5,000	150,000,000	5000	160,000,000	5500	170,000,000	5500	180,000,000	5500	190,000,000	6000	200,000,000
Sub Kegiatan : Pengumpulan, Analisis, dan Disem	inasi Data Pencatatan Sipii		I	2021		2022	I	2023		2024		2025	I	2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah dokumen perkembangan pencatatan sipil		dokumen	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	1	75,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	•					•		•		I.	L	•	L.	
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase kegiatan pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang terbitkan dibagi jumlah penduduk yang mengajukan pendaftaran atas dokumen pencatatan sipil dikali seratus	%	95	250,000,000	95	305,000,000	96	320,000,000	97	345,000,000	98	370,000,000	99	395,000,000
Sub Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemeri	intah dan Lembaga Non-Pemerintah d	i Kabupaten	/Kota dalam P	enertiban Pelayan	an Pencatatan S	Sipil	•	•				•		
INDIKATOR SUR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATHAN		2021	- :	2022		2023		2024		2025		2026

INDINATOR OUD REGISTRA	META INDINATOR	OAT VAIL	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah koordinasi yang diselenggarakan		Kali	2	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	120,000,000	4	130,000,000

Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftara	an Peristiwa Kependudukan dan Pend	catatan Perist	tiwa Penting to	erkait Pencatatan	Sipil									
INDUCATOR OUR VEGUATAN	META INDUCATOR	04711411		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan		Kali	130	100,000,000	130	100,000,000	130	110,000,000	130	120,000,000	130	130,000,000	130	140,000,000
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas	si kepada Pemangku Kepentingan da	n Masyaraka	terkait Penca	ıtatan Sipil										
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDICATOR GOD REGISTAR	III TA INDICATOR	OATOAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	1	orang	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,000,000	100	115,000,000	100	120,000,000	100	125,000,000
SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PER DAN PEWARGANEGARAAN	RUBAHAN STATUS ANAK,													
Program : Pencatatan Sipil														
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN		2021	1	2022		2023		2024		2025		2026
INDIRATOR PROGRAM	WETAINDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk dikali seratus	%	95	350,000,000	95	415,000,000	96	430,000,000	97	455,000,000	98	480,000,000	99	495,000,000
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIRATOR REGIATAN	WETAINDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang mengajukan pendaftaran atas dokumen pencatatan sipil dikali seratus	%	95	100,000,000	95	105,000,000	96	110,000,000	97	115,000,000	98	120,000,000	99	125,000,000
Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pen	catatan Sipil													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB REGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah dokumen Akta kematian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan		Dokumen	1,000	100,000,000	1,010	105,000,000	1,020	110,000,000	1,030	115,000,000	1,041	120,000,000	1,041	125,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
				2021	1	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk yang mengajukan pendaftaran atas dokumen pencatatan sipil dikali seratus	%	95	150,000,000	95	210,000,000	96	220,000,000	97	240,000,000	98	260,000,000	99	270,000,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dengan Kantor Kement	erian yang Menyelenggarakan Urusa	n Pemerintah	an di Bidang	Agama Kabupaten	/Kota dan Peng	adilan Agama yang	Berkaitan de	engan Pencatatan I	Nikah, Talak,	Cerai, dan Rujuk ba	agi Penduduk	yang Beragama Is	lam	
				2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Kali	2	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	120,000,000	4	130,000,000
Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah peserta sosialisasi		orang	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	140,000,000	100	140,000,00
<mark>Kegiatan</mark> : Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng	ggaraan Pencatatan Sipil													
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDINATOR REGIATAR	MILIA MUNATUK	SAIDAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp

pengawasan pencatatan sipil	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil dibagi jumlah kebutuhan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil dikali seratus	%	95	100,000,000	95	100,000,000	96	100,000,000	97	100,000,000	98	100,000,000	99	100,000,000	
-----------------------------	---	---	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--

Sub Kegiatan : Supervisi Bersama dengan Ka	mor remementally ung menyelengge			Pembangunan Ba	asis Data Kepen	dudukan terkait Pe	ncatatan Sipi	il						
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB REGIATAN	META INDIRATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah Supervisi Yang Dilaksanakan		Kali	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000
DIDANG DENGELOLAAN INFORMAC	LADMINICTRACI MEDENDI	IDUIZAN												
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data yang le		DUKAN												
Sasaran . Wenningkannya ketersediaan data yang le	nigkap dan mutakini	1		2021	1 3	022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	2026 Rp
Persentase ketersediaan Yang Lengkapdan Mutakhir	Jumlah data bersih yang dimanfaatkan dibagi jumlah keseluruhan data dikali seratus	%	95	945,000,000	95	1,010,000,000	96	1,075,000,000	97	1,170,000,000	98	1,220,000,000	99	1,275,000,000
SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRA	SI KEPENDUDUKAN													
Program : Pengelolaan Sistem Informasi Administ	rasi Kependudukan													
INDIVATOR PROGRAM	META INDUCATOR	04711411		2021	2	022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase data konsolidasi bersih	Jumlah data bersih yang sudah diverifikasi dibagi jumlah data dikali seratus	%	95	400,000,000	95	445,000,000	96	490,000,000	97	555,000,000	98	585,000,000	99	620,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informas	i Administrasi Kependudukan													
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	022		2023		2024		2025		2026
INDIRATOR REGIATAN	WETA INDIRATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan dibagi jumlah kebutuhan Informasi Administrasi Kependudukan	%	95	350,000,000	95	385,000,000	96	420,000,000	97	475,000,000	98	495,000,000	99	520,000,000
	•		•		•				•		•			
Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Inforn	nasi Administrasi Kependudukan	Г												
				0004		000		0000		0004		0005		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		022		2023	TAROFT	2024		2025	1	2026
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi	META INDIKATOR		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET 7	Rp.	TARGET 8	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET 10	Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi		SATUAN Kali							TARGET 8				TARGET 10	
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi			TARGET	Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	TARGET	Rp.		Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi			TARGET 5	Rp.	TARGET 6	Rp.	TARGET 7	Rp.		Rp.	TARGET 9	Rp.		Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info	rmasi Administrasi Kependudukan	Kali	TARGET 5	Rp. 150,000,000	TARGET 6	Rp. 175,000,000	TARGET 7	Rp. 200,000,000	TARGET	Rp. 225,000,000	TARGET 9 TARGET	Rp. 235,000,000	10	Rp 250,000,000 2026 Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi	rmasi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR	Kali SATUAN orang	TARGET 5 TARGET 100	Rp. 150,000,000	TARGET 6	Rp. 175,000,000	TARGET 7	Rp. 200,000,000	8	Rp. 225,000,000 2024	TARGET 9	Rp. 235,000,000 2025	10	Rp 250,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN	rmasi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR	Kali SATUAN orang	TARGET 5 TARGET 100	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000	TARGET 7 TARGET 100	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000	TARGET	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000	TARGET 9 TARGET 100	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000	10	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR si Kepada Pemangku Kepentingan da	SATUAN orang an Masyaraka	TARGET 5 TARGET 100	Rp. 150,000,000	TARGET 6 TARGET 100	Rp. 175,000,000	TARGET 7 TARGET 100	Rp. 200,000,000	TARGET	Rp. 225,000,000	TARGET 9 TARGET 100	Rp. 235,000,000	10	Rp 250,000,000 2026 Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi	rmasi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR	Kali SATUAN orang	TARGET 5 TARGET 100	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000	TARGET 7 TARGET 100	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000	TARGET	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000	TARGET 9 TARGET 100	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000	10	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR si Kepada Pemangku Kepentingan da	SATUAN orang an Masyaraka	TARGET 5 TARGET 100	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000	TARGET TARGET 100	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000	TARGET 100	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000	TARGET 100	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000	10 TARGET 100	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR i Kepada Pemangku Kepentingan da META INDIKATOR	SATUAN orang on Masyaraka SATUAN orang	TARGET 5 TARGET 100 t TARGET	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000 2021 Rp.	TARGET 6 TARGET 100 TARGET	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000	TARGET TARGET 100 TARGET	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000 2023 Rp. Rp.	TARGET 100	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000 2024 Rp.	TARGET 9 TARGET 100 TARGET	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000 2025 Rp. Rp.	TARGET 100	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000 2026 Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR i Kepada Pemangku Kepentingan da META INDIKATOR	SATUAN orang on Masyaraka SATUAN orang	TARGET 5 TARGET 100 t TARGET 50	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100 TARGET 50	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000 022 Rp. 110,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000 2023 Rp. 120,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000 2024 Rp. 130,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000 2025 Rp. 140,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000 2026 Rp 150,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelola INDIKATOR KEGIATAN	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR si Kepada Pemangku Kepentingan da META INDIKATOR an Informasi Administrasi Kependud	SATUAN orang n Masyaraka SATUAN orang ukan	TARGET 5 TARGET 100 t TARGET 50	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100 TARGET 50	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000 022 Rp. 110,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000 2023 Rp. 120,000,000	TARGET 100	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000 2024 Rp. 130,000,000	TARGET 9 TARGET 100 TARGET 50	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000 2025 Rp. 140,000,000	TARGET 100	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000 2026 Rp
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelola	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR Si Kepada Pemangku Kepentingan da META INDIKATOR an Informasi Administrasi Kependud	SATUAN orang n Masyaraka SATUAN orang ukan	TARGET 5 TARGET 100 t TARGET 50	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100 TARGET 50	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000 022 Rp. 110,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000 2023 Rp. 120,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000 2024 Rp. 130,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000 2025 Rp. 140,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000 2026 Rp 150,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelola INDIKATOR KEGIATAN Persentase pembinaan dan pengawasan yang	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR si Kepada Pemangku Kepentingan da META INDIKATOR an Informasi Administrasi Kependud META INDIKATOR Jumlah lembaga yang dibina dan diawasi terkait pemanfaatan SIAK dibagi jumlah kebutuhan pembinaan dan pengawasan SIAK dikali seratus	SATUAN orang an Masyaraka SATUAN orang lukan SATUAN	TARGET	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100 TARGET 50 TARGET	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000 022 Rp. 110,000,000	TARGET 100 TARGET 50 TARGET	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000 2023 Rp. 120,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000 2024 Rp. 130,000,000	TARGET 100 TARGET 50 TARGET	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000 2025 Rp. 140,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000 2026 Rp 150,000,000
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk Yang Difasilitasi Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Info INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukas INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelola INDIKATOR KEGIATAN Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	masi Administrasi Kependudukan META INDIKATOR si Kepada Pemangku Kepentingan da META INDIKATOR an Informasi Administrasi Kependud META INDIKATOR Jumlah lembaga yang dibina dan diawasi terkait pemanfaatan SIAK dibagi jumlah kebutuhan pembinaan dan pengawasan SIAK dikali seratus	SATUAN orang an Masyaraka SATUAN orang lukan SATUAN	TARGET 5 TARGET 100 t TARGET 50 TARGET 95	Rp. 150,000,000 2021 Rp. 100,000,000 2021 Rp. 100,000,000	TARGET 6 TARGET 100 100 TARGET 50 TARGET 95	Rp. 175,000,000 022 Rp. 100,000,000 022 Rp. 110,000,000	TARGET 100 TARGET 50 TARGET 96	Rp. 200,000,000 2023 Rp. 100,000,000 2023 Rp. 120,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp. 225,000,000 2024 Rp. 120,000,000 2024 Rp. 130,000,000	TARGET 100 TARGET 50 TARGET 98	Rp. 235,000,000 2025 Rp. 120,000,000 2025 Rp. 140,000,000	TARGET 100 TARGET 50	Rp 250,000,000 2026 Rp 120,000,000 2026 Rp 150,000,000

[1	1	1 1	Ī	Ī	I	1	I	I	I	Ī	I	
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		Kali	4	50,000,000	4	60,000,000	4	70,000,000	4	80,000,000	4	90,000,000	4	100,000,000
SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN I	DATA KEPENDUDUKAN													
Program : Pengelolaan Sistem Informasi Administ	rasi Kependudukan													
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase data konsolidasi bersih	lumlah data bassih yang aydah		TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase data konsolidasi bersin	Jumlah data bersih yang sudah diverifikasi dibagi jumlah data dikali	%	95	325,000,000	95	335,000,000	96	345,000,000	97	365,000,000	98	375,000,000	99	385,000,000
Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan	Pemanfaatan dan Penyajian Databas	e Kependudu							•					
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase Pengumpulan, Pemanfaatan dan	Jumlah Permintaan Data yang		TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Penyajian Data Base Kependudukan yang telah	dikonsolidasi dibagi Jumlah	%	95	160,000,000	95	170,000,000	96	180,000,000	97	200,000,000	98	210,000,000	99	220,000,000
Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Ke	pendudukan	1	1						1		1		1	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
		071107111	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Jumlah dokumen data kependudukan yang diterbitkan		dokumen	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000
Sub Kegiatan : Inventarisasi Data untuk Kepenting	an Pembangunan Daerah													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
		071107111	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Jumlah inventarisasi data		Data	12	50,000,000	12	60,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informas	si Administrasi Kependudukan	1	1								1		1	
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Informasi Administrasi		TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Kependudukan yang diselenggarakan	Kependudukan yang	%	95	165,000,000	95	165,000,000	96	165,000,000	97	165,000,000	98	165,000,000	99	165,000,000
Sub Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan yan	g akurat dan dapat dipertanggungjaw	/abkan	T						ı		ı		1	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2,023		2024		2025		2026
Jumlah Pemutakhiran Data Kependudukan Yang			TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Diselenggarakan		Kali	1	165,000,000	1	165,000,000	1	165,000,000	1	165,000,000	1	165,000,000	1	165,000,000
Program : Pengelolaan Profil Kependudukan														
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
	hardet determine		TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase profil data kependudukan kabupaten	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dibagi jumlah kebutuhan data penyusunan profil kependudukan dikali seratus	%	95	220,000,000	95	230,000,000	96	240,000,000	97	250,000,000	98	260,000,000	99	270,000,000
Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan							•		•		•			
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
		071107111	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan	Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak dibagi jumlah kebutuhan akan buku profil kependudukan dikali seratus	%	95	220,000,000	95	230,000,000	96	240,000,000	97	250,000,000	98	260,000,000	99	270,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan K	abupaten/Kota													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Jumlah Buku Data Agregat Yang Diterbitkan	Land to Brook to Konson to 1.1	Buku	170	120,000,000	170	120,000,000	170	120,000,000	170	120,000,000	170	120,000,000	170	120,000,000
Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembar	ngan dan Proyeksi Kependudukan se	rta Kebutuha		2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	2026 Rp								
Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan		Buku	25	100,000,000	25	110,000,000	25	120,000,000	25	130,000,000	25	140,000,000	25	150,000,000

Sasaran : Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjas	sama Pemanfaatan Data Kependuduk	an												
INDIVATOR CACARAN	META INDUCATOR	0.4711431		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase Instansi/Lembaga Yang Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah instansi/lembaga di kabupaten kali seratus	%	95	750,000,000	95	790,000,000	96	830,000,000	97	870,000,000	98	910,000,000	99	950,000,000
OFKOLKED IAOAMA DAN INOVAOLDELA	VANAN													
Program: Pengelolaan Sistem Informasi Administ														
				2021	1	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase data konsolidasi bersih	Jumlah data bersih yang sudah diverifikasi dibagi jumlah data dikali seratus	%	95	400,000,000	95	420,000,000	96	440,000,000	97	460,000,000	98	480,000,000	99	500,000,000
	•	•	•	750,000,000	ı	790,000,000		830,000,000		870,000,000		910,000,000	1	950,000,000
Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan	Pemanfaatan dan Penyajian Databas	e Kependudu	ıkan								•			
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase Pengumpulan, Pemanfaatan dan	Jumlah Barmintaan Data yang		TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Penyajian Data Base Kependudukan yang dikonsolidasikan oleh Dukcapil	Jumlah Permintaan Data yang dikonsolidasi dibagi Jumlah Lembaga yang terkait dengan Pengelolaan Pemanfaatan Data Base Kependudukan dikali seratus	%	95	150,000,000	95	155,000,000	96	160,000,000	97	165,000,000	98	170,000,000	99	175,000,000
Sub Kagistan - Kariasama Bamanfaatan Data Kana	ondudukan													
Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kepe		1	1	2021	1 2	2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan		Dokumen	5	150,000,000	5	155,000,000	10	160,000,000	10	165,000,000	10		10	175,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informas	si Administrasi Kependudukan				U			•					l l	
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan dibagi jumlah Informasi Administrasi	%	95	250,000,000	95	265,000,000	96	280,000,000	97	295,000,000	98	310,000,000	99	325,000,000
Sub Kegiatan : Kerjasama Dengan Organisasi Ken	masyarakatan dan Perguruan Tinggi													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021	2	2022		2023		2024		2025		2026
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan		Dokumen	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	1	150,000,000
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukas	si Kepada Pemangku Kepentingan dai	n Masyarakat	I	2021		2022		2023		2024		2025		2026
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	2026 Rp								
Jumlah Pertemuan Yang Dilakukan		Kali	70	150,000,000	70	155,000,000	70	160,000,000	70	165,000,000	70	170,000,000	70	175,000,000
	-	I	I		I	Į.		•		<u> </u>				
SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKU	JMEN KEPENDUDUKAN													
Program : Pengelolaan Sistem Informasi Administ	trasi Kependudukan				1									
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET	2021 Rp.	TARGET	2022 Rp.	TARGET	2023 Rp.	TARGET	2024 Rp.	TARGET	2025 Rp.	TARGET	2026 Rp
Persentase data konsolidasi bersih	Jumlah data bersih yang sudah diverifikasi dibagi jumlah data dikali seratus	%	95	350,000,000	95	370,000,000	96	390,000,000	97	410,000,000	98	430,000,000	99	450,000,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informas	si Administrasi Kependudukan													
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
		57 OZNI	TARGET	Rp.	TARGET	Rp								
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan dibagi jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan	%	95	175,000,000	95	185,000,000	96	195,000,000	97	205,000,000	98	215,000,000	99	225,000,000

Sub Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemerin	tahan dan Lembaga Non Pemerintah	nan di Kabup	aten/Kota Dala	m Penertiban Pen	gelolaan Inform	asi Administrasi K	ependudukan	1						
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	:	2021	2	022		2023		2024		2025		2026
INDICATOR SOB REGIATAN	TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.													
umlah Koordinasi Yang Dilaksanakan Kali 70 150,000,000 70 155,000,000 70 160,000,000 70 165,000,000 70 170,000,000 70 175,000,000														
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	ı Kependudukan													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	:	2021	2	022		2023		2024		2025		2026
INDICATOR SOB REGIATAN	META INDIRATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp
Jumlah Laporan Data Balikan		Laporan	10	25,000,000	20	30,000,000	20	35,000,000	20	40,000,000	20	45,000,000	20	50,000,000

Taliwang, 24 September 2021

Taliwang, 24 Septemb

Kepala-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINIS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATA SIPIL *

M8 IBRAHIM, S.Sos, MM

NIP. 19651028 198611 1 001